

**DINAMIKA INTERAKSI ANTARAKTOR DALAM KEBIJAKAN “TRAVEL
BAN” DI ERA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP (2017-2020)**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FADEL GADING PARINGOTAN NASUTION

20323369

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**DINAMIKA INTERAKSI ANTARAKTOR DALAM KEBIJAKAN “TRAVEL
BAN” DI ERA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP (2017-2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

FADEL GADING PARINGOTAN NASUTION

20323369

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

DINAMIKA INTERAKSI ANTARAKTOR DALAM PEMBENTUKAN LEGITIMASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI: ANALISIS KEBIJAKAN “TRAVEL BAN” DI ERA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP (2017-2020)

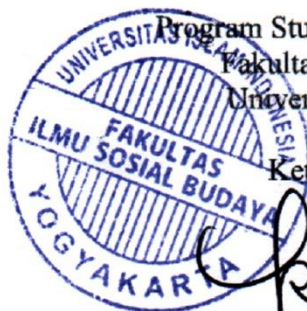
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran akademik integritas.

Yogyakarta, 20 Januari 2026



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Fadel Gading Paringotan

HALAMAN MOTTO

*“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical
and our hearts are open”*

(Albus Dumbledore)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط
اَللّٰهُ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا وَاْتَقُوْا

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

(Q.S. Al-Ma’idah (5):8

“To Anyone is alone in a crowded room, put your hands up high sing in out of tune, its these late night hours we spend that, help me up from down – we got this!”

(A Day To Remember – We Got This)

Corporate leaders, politicians, Kids can’t vote, adults elect them, Laws that rule the school and workspace, signs that caution, 16s unsafe, We really need to see this through, We never wanted to be abused, We’ll never give up, its no use

(Blink 182 – Anthem Part Two)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullilahi rabbil'alamin

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas kuasa dan rahmat serta hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini saya persembahkan sebagai wujud tanggung jawab akademik sekaligus ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Mama, Herlina Lubis. Mama adalah sumber penguat dan motivasi saya, terimakasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran dan pengorbanan yang tak terhitung, dan tempat pulang di setiap lelah dan ragu. Karya ini menjadi wujud kecil dari rasa bakti dan terimakasih saya kepada mamah
2. Ayah tersayang, Bachder Johan Nasution. Terimakasih atas kerja keras, nasihat dan keteguhan yang selalu menjadi teladan bagi saya, dukungan beserta kepercayaan Ayah adalah alasan saya terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini.
3. Kakak Tapi Longga Singgarniari Nasution. Terimakasih atas keceriaan yang menjadi sumber penyemangat dan motivasi dan alasan saya ingin selalu pulang.
4. Adik Dhini Uli Fathia Nasution. Terimakasih atas dukungan dan doa, yang

selalu mengiringi, semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi, untuk terus melanjutkan perjuangan.

5. NIM 21323170. Terimakasih atas doa, motivasi, bantuan dan dukungan yang selalu menyertai saya, dalam setiap keraguan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat dan Teman-Teman Unisi Music Community 20: Reyhan Indra, Danang P, Dito Dzaki, M.Fahmi,M.Gorbon rian, Andika, Tufail Al-atra, Nanda Sultan, M. Robbi, Luthfi S, M. Hidayat, M. JihanSabban, Ilyasa Razzan. Atas setiap momen berharga yang dilalui bersama. Teman-Teman sejawat HI UII: Athaya Afnanda, Hudzaifah safieq, Renaldy Surya, M. Fulvian, Farly. Terimakasih sudah menjadi pendamping dan tempat untuk berdiskusi dan berproses bersama. serta Teman Medan saya: Putra Salisa,Hafidz Abdul Khaliq, Trisna Prasatria, Rizky Wicaksono. Yang menjadi pengingat hangatnya rumah disaat sedang berproses mengerjakan skripsi ini.
7. Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri Fadel Gading Paringotan Nasution. Terimakasih karena tidak menyerah meski lelah, tidak berhenti meski ragu, dan tetap berdiri meski banyak tekanan datang.Terimakasih telah bertahan dalam proses yang panjang, menanggung harapan dengan penuh tanggung jawab dan terus berusaha menjadi sosok yang tegar. Karya ini adalah bukti bakti saya terhadap keluarga dan orang terdekat yang senantiasa berdiri disamping dan turut menopang setiap keraguan dan dilema yang dialami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang telah disusun, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dr. Rer. Soc. Masduki, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FISB) UII
4. Kepada seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII, yang telah berperan untuk membimbing, memberikan ilmu, serta inspirasi sepanjang perjalanan akademik penulis
5. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional
6. Bapak Mohamad Rezky Utama S.IP., M.Si. sebagai dosen pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu, berbagi arahan serta motivasi hingga selesainya penelitian ini.
7. Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2020, terima kasih telah saling berbagi pengalaman dan momen berharganya selama masa perkuliahan, semoga

kita senantiasa diiringi kesehatan dan kelancaran di masa depan.

Teakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mampu berkontribusi dalam ranah ilmu pengetahuan terkhusus, sektor hubungan internasional.

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14

1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 KONTESTASI KEBIJAKAN “TRAVEL BAN” DALAM POLITIK DOMESTIK AMERIKA SERIKAT (2017-2020).....	17
2.1 Peran Pemerintah Sebagai Produsen Kebijakan “ <i>Travel Ban</i> ”	18
2.2 Reaksi Publik sebagai “Umpan Balik” Terhadap Kebijakan.....	23
2.3 Media Massa Sebagai Aktor Penyedia Informasi Sekaligus Perantara Antara Media Dan Publik Dalam Kebijakan “ <i>Travel Ban</i> ”	26
BAB 3 ANALISIS INTERAKSI ANTARAKTOR DALAM KEBIJAKAN “TRAVEL BAN”	31
3.1 Interaksi Pemerintah dan Media: Strategi Penguasaan Pasar Kebijakan Luar Negeri.....	31
3.2 Opini Publik sebagai Konsumen: Antara Dukungan Partisan dan Realitas Empiris	33
3.3 Pencapaian Keseimbangan Pasar: Revisi Kebijakan Sebagai Adaptasi Strategis	36
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
Tabel Kesimpulan Interaksi Antar Aktor.....	42
4.2 Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Kesimpulan Interaksi Antaraktor

DAFTAR SINGKATAN

ACLU	: American Civil Liberties Union
CAIR	: Council on American-Islamic Relations
CNN	: Cable News Network
DHS	: Department of Homeland Security
EO	: Executive Order
FBI	: Federal Bureau of Investigation
ICE	: Immigration and Customs Enforcement
IIE	: Institute of International Education
INA	: Immigration And Nationality Act
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
JFK	: John F. Kennedy International Airport
LAX	: Los Angeles International Airport
NEA	: National Education Association
SCOTUS	: Supreme Court of The United States
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh gestur kepemimpinan Donald Trump terhadap legitimasi dan stabilitas politik Amerika Serikat melalui dinamika opini publik atas kebijakan “*Travel Ban*” (2017–2020). Masalah utama adalah bagaimana komunikasi politik Trump, pembingkai media, dan respons publik domestik serta global berinteraksi dalam membentuk legitimasi kebijakan luar negeri yang kontroversial. Kerangka pemikiran menggunakan *Foreign Policy Marketplace* oleh Baum dan Potter (2008) yang menjelaskan hubungan antara media massa, opini publik, dan pembuat kebijakan. Argumen sementara menyatakan bahwa opini publik bukan sekadar respons pasif, tetapi kekuatan aktif yang mendorong revisi kebijakan melalui tekanan moral, politis, dan informasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa “*Travel Ban*” memicu polarisasi opini publik; media memainkan peran penting dalam memperluas narasi moral dan emosional; serta tekanan publik dan litigasi hukum memaksa penyesuaian kebijakan. Respons global juga menunjukkan dampak terhadap kredibilitas internasional AS dan menciptakan *feedback loop* yang memengaruhi legitimasi kebijakan.

Kata-kata kunci: Komunikasi politik, legitimasi kebijakan, media massa, opini publik, *Travel Ban*, Trump.

ABSTRACT

This study examines the influence of Donald Trump’s leadership gestures on the legitimacy and political stability of the United States through public opinion dynamics regarding the “Travel Ban” (2017–2020). The issue addressed is how Trump’s political communication, media Framing, and domestic and global public reactions interact to shape the legitimacy of this controversial foreign policy. The theoretical framework uses the Foreign Policy Marketplace by Baum and Potter (2008), explaining the relationship between Mass Media, public opinion, and decision makers. The provisional argument asserts that public opinion is an active force that drives policy revision through moral, political, and informational pressures. Findings show that the “Travel Ban” triggered sharp public opinion polarization; media played a key role in expanding moral and emotional narratives; and public pressure and legal challenges forced policy adjustments. Global responses also impacted U.S. international credibility, creating a feedback loop influencing policy legitimacy.

Keywords: *Mass Media, policy legitimacy, political communication, public opinion, Travel Ban, Trump.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kacamata ilmu hubungan internasional dan politik domestik Amerika Serikat, opini publik menempati posisi yang amat strategis dalam menjaga keseimbangan demokrasi serta menentukan arah stabilitas dan legitimasi pemerintahan, dimana media massa berperan sebagai arena utama dalam pembentukan dan indeksasi isu yang menjadi perhatian publik. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memilih, menekankan, dan membingkai isu tertentu sehingga mampu mempengaruhi persepsi kolektif mengenai tingkat kepentingan suatu kebijakan serta nilai legitimasi moral yang melekat padanya. Peran ini menjadi semakin signifikan ketika kebijakan yang diambil bersifat kontroversial dan berdampak luas, termasuk dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat seperti kebijakan “*Travel Ban*” yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald J. Trump dalam masa kepemimpinannya pada periode 2017–2020 (Kirdiş 2021).

Dalam konteks ini, opini publik tidak hanya berperan sebagai refleksi terhadap kebijakan negara, tetapi juga sebagai kekuatan aktif yang turut membentuk arah politik nasional melalui reaksi dan interpretasi masyarakat terhadap tindakan simbolik pemerintah (Sides et al. 2018). Dinamika ini semakin menguat ketika figur pemimpin negara memiliki gaya kepemimpinan yang personalistik dan komunikatif, sehingga kebijakan publik tidak hanya dipersepsikan sebagai produk institusi, tetapi juga sebagai refleksi langsung dari nilai, identitas, dan orientasi politik pemimpinnya. Hal ini terlihat jelas dalam kepemimpinan Donald J. Trump,

yang tampil sebagai figur *outsider* dalam politik Amerika Serikat dengan latar belakang pengusaha dan selebritas media, serta mengandalkan hubungan langsung dengan publik melalui media massa dan media sosial sebagai sumber utama legitimasi politiknya (Moffitt 2016).

Sejak masa kampanye pemilihan presiden tahun 2016, Trump secara konsisten menjadikan isu imigrasi dan keamanan nasional sebagai narasi sentral dalam mobilisasi politiknya. Retorika mengenai ancaman terorisme, kegagalan sistem imigrasi, dan perlunya perlindungan terhadap kedaulatan negara digunakan untuk membangun resonansi emosional dengan basis pemilih konservatif dan nasionalis. Dalam konteks ini, janji kampanye Trump untuk memberlakukan pembatasan masuk terhadap warga negara dari negara-negara mayoritas Muslim yang kemudian dikenal sebagai “*Travel Ban*” menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah respons spontan terhadap situasi internasional, melainkan bagian dari strategi politik yang telah dikonstruksikan sejak sebelum Trump menjabat sebagai presiden (Peter Margulies 2019)

Kebijakan “*Travel Ban*” secara resmi diwujudkan pada 27 Januari 2017 melalui perintah resmi presiden Trump (*Executive order*) 13769, berjudul *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*, dan segera menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah politik Amerika Serikat modern. Pada tahap awal, kebijakan ini melarang masuknya warga negara dari tujuh negara mayoritas Muslim Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman dengan dalih utama keamanan nasional, dan pencegahan terorisme. Namun, kebijakan ini dengan cepat memicu gelombang protes publik, gugatan hukum di berbagai negara bagian, serta kritik internasional karena

dianggap bersifat diskriminatif berbasis agama. Opini publik Amerika Serikat pun terbelah, dimana kelompok konservatif mendukung kebijakan tersebut atas dasar keamanan dan kedaulatan negara, sementara kelompok liberal dan organisasi hak asasi manusia menentangnya karena dinilai bertentangan dengan nilai inklusivitas dan kebebasan beragama (Clapton 2021).

Urgensi kebijakan “*Travel Ban*”, sebagaimana dikonstruksikan oleh pemerintahan Trump, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan politik domestik untuk mempertahankan dukungan publik dan memenuhi ekspektasi basis pemilih. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai langkah darurat untuk menutup celah keamanan nasional dan memperbaiki sistem penyaringan imigrasi. Namun, *framing* tersebut terus diproduksi dan diperdebatkan melalui media massa, yang tidak hanya menyampaikan argumen pemerintah, tetapi juga mengindeks kritik elit politik, keputusan pengadilan, serta reaksi masyarakat sipil. Akibatnya, “*Travel Ban*” berkembang menjadi simbol politik yang merepresentasikan agenda “*America First*” dan gaya kepemimpinan Trump yang konfrontatif terhadap norma liberal dan multilateral (Max Bergmann and Victor Cha 2020).

Dampak kebijakan “*Travel Ban*” dirasakan luas oleh berbagai kelompok sosial. Secara langsung, kebijakan ini mempengaruhi warga negara dari negara-negara yang tercantum dalam daftar larangan termasuk pelajar internasional yang tertahan di bandara, pekerja imigran dengan visa aktif, pengunjung yang telah lolos proses penempatan, serta individu yang telah memiliki visa atau izin tinggal di Amerika Serikat. Ribuan orang mengalami penolakan masuk, penahanan di bandara internasional, dan pemisahan keluarga lintas negara. Secara tidak langsung, kebijakan ini memperkuat stigma dan rasa tidak aman di kalangan komunitas

Muslim di Amerika Serikat, sekaligus mencederai citra internasional Amerika Serikat sebagai negara yang selama ini mengklaim diri sebagai pelindung hak asasi manusia (Muzaffar Chishti and Jessica Bolter 2019).

Secara kronologis, kebijakan “*Travel Ban*” mengalami beberapa tahapan penting. *Executive Order 13769* (“*Travel Ban 1.0*”) pada Januari 2017 diblokir oleh pengadilan federal. Revisi kemudian dilakukan melalui *Executive Order 13780* (“*Travel Ban 2.0*”) pada Maret 2017, yang menyesuaikan bahasa kebijakan dan menghapus Irak dari daftar negara terlarang. Puncaknya terjadi pada September 2017 melalui *Presidential Proclamation 9645* (“*Travel Ban 3.0*”), yang menginstitutionalisasi pembatasan perjalanan dengan memasukkan negara non-Muslim dan menekankan standar keamanan nasional. Versi ini akhirnya disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2018, menandai adaptasi kebijakan terhadap tekanan opini publik dan institusi hukum (William C. Canby, Richard R. Clifton, and et al. 2017).

Lebih lanjut, dinamika kebijakan “*Travel Ban*” menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari mekanisme umpan balik antara opini publik, media massa, dan pembuat kebijakan. Media berperan sebagai kanal utama yang menghubungkan respons publik dengan elite politik, baik melalui pemberitaan, *framing* isu, maupun sorotan terhadap konflik hukum dan politik yang menyertai kebijakan tersebut. Intensitas liputan media terhadap “*Travel Ban*” tidak hanya mencerminkan tingkat kontroversi kebijakan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi publik mengenai legitimasi dan urgensi kebijakan tersebut. Dalam situasi ini, opini publik menjadi faktor yang terus dipantau dan dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan,

khususnya ketika kebijakan menghadapi tantangan hukum dan tekanan politik yang berkelanjutan (Gadi Wolfsfeld 1997).

Reaksi global juga datang dari organisasi internasional dan aktor non-negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Kantor Komisaris Tinggi HAM, menilai “*Travel Ban*” bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan pengungsi sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Organisasi hak asasi manusia seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengkritik kebijakan ini sebagai dekrit berbahaya yang melegitimasi kebijakan berbasis identitas agama dalam sistem internasional. Gelombang protes solidaritas yang muncul di berbagai kota dunia menunjukkan bahwa “*Travel Ban*” tidak hanya dipersepsikan sebagai isu kebijakan domestik Amerika Serikat, melainkan sebagai kebijakan dengan implikasi normatif terhadap rezim hak asasi manusia global (Amnesty International 2017).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri di era kepemimpinan Trump tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika domestik yang berkembang. Revisi kebijakan “*Travel Ban*” dari versi awal hingga versi ketiga mencerminkan adanya proses penyesuaian yang dipengaruhi oleh reaksi publik, keputusan lembaga peradilan, serta tekanan politik yang dimediasi oleh media massa. Dengan demikian, “*Travel Ban*” menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dalam menentukan arah, bentuk, dan legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Fenomena ini sekaligus menegaskan pentingnya analisis yang menempatkan kebijakan luar negeri tidak hanya sebagai produk kepentingan strategis negara, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika politik domestik dan

komunikasi politik dalam sistem demokrasi modern (Howell, William 2003).

Dengan demikian, kebijakan “*Travel Ban*” tidak dapat dipahami semata sebagai respons terhadap ancaman eksternal, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara figur kepemimpinan Donald J. Trump, strategi politik, peran media massa, dan dinamika opini publik. Era kepemimpinan Trump menunjukkan bahwa dalam demokrasi modern, opini publik telah berevolusi dari sekadar pengamat kebijakan menjadi kekuatan utama yang menentukan arah, legitimasi, dan stabilitas politik suatu negara (Homolar and Scholz 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika interaksi antaraktor berlangsung dalam kebijakan “*Travel Ban*” Amerika Serikat pada tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika interaksi antara opini publik, media massa dalam merespons kebijakan “*Travel Ban*”, sebagai ekspresi kepemimpinan politik pemerintahan Donald Trump pada periode 2017-2020.
2. Menjelaskan bagaimana pembingkai media dan fragmentasi pandangan publik mempengaruhi legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam konteks kebijakan “*Travel Ban*”

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada periode 2017-2020, yaitu masa kepemimpinan Donald Trump yang memperlihatkan dinamika kompleks antara kebijakan luar negeri, komunikasi politik presiden, dan pembentukan opini publik di Amerika Serikat. Pemilihan periode ini didasari pada intensitas kebijakan kontroversial, khususnya kebijakan “*Travel Ban*”, yang memicu perdebatan luas baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam konteks tersebut, opini publik dipahami tidak hanya sebagai kekuatan normatif dan politis yang berperan aktif dalam membentuk legitimasi kebijakan luar negeri. Penelitian ini membatasi kajian pada interaksi antara opini publik, pbingkaiian media massa, dan respons pembuat kebijakan terhadap “*Travel Ban*”. Tanpa menelaah secara teknis aspek hukum imigrasi secara mendalam. Dengan demikian, cakupan penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana dinamika opini publik dan media massa berkontribusi terhadap legitimasi dan stabilitas politik Amerika Serikat, selama penerapan kajian tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berlangsungnya penelitian ini, tidak terlepas dari pengaruh peneliteiten sebelumnya terkait pengaruh gestur kepemimpinan dalam membentuk opini publik, Guna menunjang relevansi peneliteiten. Berikut beberapa kajian pustaka yang mengandung korelasi yang serupa dengan peneliteiten ini:

Pertama, kajian dari Matthew A. Baum and Philip B. K. Potter dalam jurnal politik berjudul “*Media, Public Opinion, and Foreign Policy in the Age of Trump*” yang menjelaskan bagaimana hubungan antara media massa, opini publik, dan

kebijakan luar negeri tidak lagi bersifat satu arah, tetapi saling mempengaruhi dalam era media sosial, dimana mereka menemukan bahwa adanya *information asymmetries* dalam kebijakan luar negeri yang menjadikannya lebih kompleks serta fragmentasi media modern, yang menjadikan opini publik semakin sulit mendoktrin tindakan pembuat kebijakan di ranah global, dimana temuan ini sangat relevan karena memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam memahami interaksi media dan publik terhadap legitimasi kebijakan kontroversial seperti “*Travel Ban*” (Baum and Potter 2019). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitan ini secara spesifik menyoroti kebijakan “*Travel Ban*” sebagai gestur politik simbolik, serta menekankan bagaimana legitimasi kebijakan tersebut tergerus melalui pembingkai media dan reaksi publik yang bermuatan moral, bukan semata akibat fragmentasi media.

Kedua, penelitian domestik oleh Dini Nandya Arifin dan Muhammad Indrawan Jatmika dalam artikel “*Domestic Factors Driving US Travel Ban Policy Change From Trump To Biden*” yang menunjukkan bahwa opini publik, media dan kelompok kepentingan merupakan faktor domestik yang signifikan dalam memberi tekanan terhadap pemerintah, sehingga menciptakan perubahan kebijakan “*Travel Ban*”, serta adanya temuan bahwa opini publik dan media bukan sekadar refleksi, tetapi dapat mendorong perubahan dalam struktur kebijakan luar negeri (Dini Nandya Arifin, Muhammad Indrawan Jatmika 2025). Sementara itu, penelitan ini memperluas analisis dengan menempatkan opini publik dan media sebagai sumber legitimasi dan delegitimasi politik, bukan hanya sebagai variabel pendorong perubahan kebijakan, melainkan sebagai faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik, terhadap kepemimpinan Trump selama periode

2017- 2020.

Ketiga, penelitian oleh Jawahir Thontowi dalam artikel berjudul “Analisis Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Muslim Arab di Amerika Serikat yang dipublikasikan di Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM” mengulas respons masyarakat dan aktor hukum, terhadap kebijakan pembatasan imigran Muslim, dimana penelitian ini menemukan bahwa respon sosial terhadap kebijakan tersebut, tidak hanya berupa protes publik tetapi juga perlawanan hukum berdasarkan hak asasi, yang memperlihatkan bagaimana opini publik dapat mengubah legitimasi dan proses penegakan kebijakan (Thontowi 2017). Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan proses hukum, sebagai bagian dari dinamika legitimasi yang dipengaruhi oleh opini publik dan media massa.

Keempat, artikel dari Mukaromah dalam Jurnal Mercatoria berjudul “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)” secara khusus, menganalisis kebijakan “*Travel Ban*”, dipandang sebagai wujud diskriminasi dan Islamophobia, dan bagaimana hal itu memicu reaksi penolakan di masyarakat, dimana penelitian ini relevan dalam menegaskan bahwa opini publik berkembang, tidak hanya dari faktor politik teknis, tetapi juga dari nilai-nilai moral, identitas sosial dan persepsi media terhadap dampak kebijakan dari kelompok tertentu (Mukaromah et al. 2022). Sebaliknya, penelitian ini memposisikan isu tersebut dalam kerangka komunikasi politik dan legitimasi negara, dengan menekankan bagaimana penguatan media dan reaksi opini publik berkontribusi terhadap polarisasi sosial, serta stabilitas politik Amerika Serikat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori “*The Relationship Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis*” oleh Matthew A. Baum dan Philip B.K. Potter. Teori tersebut, menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang dipahami sebagai sebuah “*Foreign Policy Marketplace*” atau “pasar informasi” dimana informasi antar aktor-aktor politik yang memiliki posisi, kepentingan, dan akses informasi yang berbeda-beda (Baum and Potter 2008).

Dalam analogi Pasar Informasi tersebut, kebijakan luar negeri tidak muncul secara linear melalui institusi negara semata, tetapi terbentuk melalui interaksi dinamis antara pemimpin, publik, dan media massa. Informasi menjadi komoditas utama yang diproduksi, disebar, dan dikonsumsi, sementara legitimasi politik menjadi “tolak ukur” yang dipertaruhkan dalam setiap kebijakan yang telah diresmikan (Baum and Potter 2008).

Dalam konsep “*Foreign Policy Marketplace*” tersebut, pemimpin atau “*The Leaders/Decision Makers*” berperan sebagai produsen utama informasi, dimana para *Decision Makers* memiliki keunggulan informasi yang signifikan hal tersebut disebabkan oleh banyaknya ketersediaan akses yang diperoleh, termasuk sumber daya negara, akses intelijen dan otoritas dalam menentukan agenda kebijakan. Keunggulan ini memungkinkan para pemimpin untuk membingkai isu kebijakan luar negeri, sesuai dengan preferensi politik dan ideologis mereka (Baum and Potter 2008).

Pemimpin juga memiliki insentif strategis untuk mempengaruhi opini publik guna memperoleh dukungan politik, misalnya dengan menekankan isu ancaman

eksternal pada negaranya, atau urgensi perihal keamanan nasional. Namun kemampuan tersebut dibatasi oleh *elasticity of reality*, yaitu batas sejauh mana realitas dapat diputar sebelum publik menyadari ketidaksesuaian antara narasi politik dan fakta empiris. Dalam sistem demokrasi negara, pemimpin harus mempertimbangkan reaksi publik di masa yang akan datang, karena opini publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dapat mempengaruhi legitimasi dan kelangsungan kekuasaan (Baum and Potter 2008).

Public Opinion (Opini Publik) menempati posisi sebagai konsumen informasi, dimana publik memberikan mandat politik kepada pemimpin, tetapi berada dalam kondisi keterbatasan informasi (*Information gap*) dikarenakan tingginya parameter guna memahami isu kebijakan luar negeri yang kompleks. Akibatnya, publik cenderung kurang terlibat secara aktif dan lebih mengandalkan pintasan informasi, seperti mengikuti pandangan elit politik yang dipercaya, afiliasi partisan, atau pemingkalan media massa (Baum and Potter 2008).

Dalam jangka pendek, kondisi ini menghasilkan dukungan otomatis terhadap kebijakan luar negeri, terutama ketika kebijakan tersebut dikaitkan dengan keamanan nasional. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya ketersediaan informasi, publik mulai mengevaluasi kebijakan secara lebih kritis. Ketika publik menilai bahwa pemimpin telah melampaui batas *elasticity of reality*, dukungan dapat berubah menjadi penolakan yang berdampak pada legitimasi politik (Baum and Potter 2008).

Media massa (*Mass media*) berperan sebagai pedagang informasi (*middleman*) yang menghubungkan pemimpin dan publik dalam "*Foreign Policy Marketplace*". Dimana media bukan sekadar penyampai pesan para pemimpin,

melainkan sebagai aktor independen yang memiliki kepentingan profesional dan ekonomi. Di satu sisi, media bergantung pada pemimpin untuk mendapatkan akses informasi dan sumber berita, namun di sisi lain media juga bergantung pada publik sebagai audiens (Baum and Potter 2008).

Posisi ini menempatkan media untuk tetap mengikuti bingkai narasi para pemimpin demi akses, namun sekaligus menyajikan informasi yang kritis dan menarik bagi publik. Ketika terjadi perbedaan pandangan di antara pemimpin atau elit politik, media cenderung menampilkan berbagai bingkai alternatif yang membantu publik memperoleh informasi lebih beragam dan mempersempit kesenjangan informasi (Baum and Potter 2008, 57).

Keseimbangan pasar (*market equilibrium*), dalam kebijakan luar negeri tercapai ketika arus informasi antara pemimpin, media dan publik berada dalam kondisi relatif seimbang. Dimana pada tahap ini, pemimpin tidak lagi sepenuhnya mampu mengontrol narasi kebijakan, sementara publik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk meninjau kembali dan mempengaruhi arah legitimasi kebijakan melalui opini yang terbentuk (Baum and Potter 2008, 57).

Media memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ini dengan menyalurkan informasi, konflik elit, dan realitas empiris kepada publik. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dalam sistem demokrasi negara merupakan hasil dari proses adaptif yang terus menerus, dimana legitimasi kebijakan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika opini publik dan realitas yang dimediasi oleh media massa (Baum and Potter 2008, 57).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka “*Foreign Policy Marketplace*”, penelitian ini berargumen bahwa kebijakan “*Travel Ban*” era Donald Trump (2017-2020), merupakan hasil interaksi strategis antara pemimpin sebagai produsen informasi, media massa sebagai perantara dan pedagang informasi, serta opini publik sebagai konsumen informasi. “*Travel Ban*” tidak semata merupakan respons terhadap isu ancaman keamanan, tetapi kebijakan yang sejak awal dibingkai untuk, memenuhi preferensi politik Trump dan agenda “*America First*”. Pada penerbitan *Executive Order 13769*, Trump memanfaatkan keunggulan informasi dan momentum politik, untuk meringkai kebijakan sebagai langkah darurat keamanan nasional.

Namun meningkatnya liputan media, gugatan hukum, dan perbedaan sikap pemimpin sebagai produsen kebijakan, lalu mempersempit celah kesenjangan informasi. Dimana media menghadirkan bingkai alternatif terkait dampak kemanusiaan dan isu konstitusional. Adanya serangkaian revisi terhadap kebijakan “*Travel Ban*” menunjukkan adaptasi terhadap batas “*elasticity of reality*”, melalui tekanan hukum dan opini publik. Sehingga kebijakan akhirnya menjadi hasil negosiasi antara strategi politik, tekanan domestik, dan legitimasi institusional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis mengambil metode kualitatif, guna menunjang analisis dengan format deskriptif, guna menganalisis suatu fenomena ataupun peristiwa sosial, dengan berlandaskan teori “*The Relationship, between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy*” by Baum and Potter (2008). Sebagai

pisau analisis, guna mempertajam argumen dan keakuratan penelitian, dalam ranah karya ilmiah. Metode ini mengambil sumber data berdasarkan informasi serta kajian literatur yang beredar dari internet sebagai acuan pustaka berjalannya penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diulas dalam penelitian ini adalah, Donald Trump sebagai aktor negara dan inisiator kebijakan “*Travel Ban*” Sedangkan Objek pada penelitian kali ini adalah Dinamika Interaksi antara *Decision makers, Public Opinion, dan Mass Media* dalam membentuk legitimasi kebijakan “*Travel Ban*” di era kepemimpinan Donald Trump, pada periode 2017-2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini, menggunakan data berbasis sekunder yang telah dimuat di kanal internet seperti jurnal, artikel, dan liputan media. Sebagai sumber data dan acuan pustaka guna memperoleh argumen analisis yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Berlangsungnya proses penelitian ini, melewati beberapa tahapan. Meliputi pembuatan kerangka dasar judul, serta revisi judul dan perbaikan teori hingga filterisasi data, berdasarkan muatan media yang diperoleh dari internet, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, guna menyeleksi variabel – variabel yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pemahaman, terhadap penelitian ini. Maka penulisan akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. BAB I: Penulis menguraikan latar belakang penelitan yang menempatkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump, dalam konteks demokrasi liberal dan komunikasi politik Trump, khususnya dalam isu imigrasi dan keamanan nasional, mampu menggiring, memobilisasi, serta mempolarisasi opini publik domestik maupun internasional.
- B. BAB II: Penulis memaparkan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitan, dengan mendefinisikan kebijakan “*Travel Ban*” sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Bab ini juga membahas konsep opini publik, pembingkai media, legitimasi kebijakan, serta peran media massa dan media digital dalam pembentukan persepsi publik. Melalui tinjauan pustaka dan kajian literatur, bab ini menjelaskan bagaimana kebijakan “*Travel Ban*” dipahami sebagai fenomena politik yang berpotensi menimbulkan polarisasi sosial, konflik normatif, dan perdebatan moral dalam masyarakat demokratis.
- C. BAB III: Penulis menganalisis secara mendalam, dinamika interaksi antara opini publik, pembingkai media, dan respons pembuat kebijakan terhadap kebijakan “*Travel Ban*”, pada masa pemerintahan Donald Trump periode 2017 – 2020. Bab ini menyoroti, bagaimana opini publik termobilisasi melalui aksi massa, media sosial, dan pemberitaan media, serta bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi legitimasi kebijakan melalui revisi kebijakan,

tekanan hukum, dan litigasi di pengadilan federal. Bab ini juga membahas dampak internasional dari “*Travel Ban*”, termasuk respons negara – negara lain dan implikasinya terhadap legitimasi global Amerika Serikat.

- D. BAB IV: Penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian mengenai peran opini publik dan pembingkai media dalam membentuk, menginterupsi, dan mengoreksi legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, melalui kasus “*Travel Ban*”. Bab ini juga memuat rekomendasi akademik dan praktis, serta refleksi atas keterbatasan peneliti, guna memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, terkait hubungan antara media, opini publik, dan legitimasi kebijakan luar negeri di era digital.

BAB 2

KONTESTASI KEBIJAKAN “TRAVEL BAN” DALAM POLITIK DOMESTIK AMERIKA SERIKAT (2017-2020)

Kebijakan “*Travel Ban*” pertama kali muncul atas inisiasi Donald Trump sebagai wujud nyata dari janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk menerapkan pengawasan ketat (*extreme vetting*) guna melindungi warga Amerika Serikat (Ali Vitali 2016). Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme global, dimana pemerintah Amerika Serikat menilai negara-negara tertentu tidak mampu menyediakan data identitas dan informasi intelijen warga mereka secara transparan. Akibat kurangnya kerja sama informasi tersebut, Amerika merasa sulit untuk memverifikasi risiko keamanan dari setiap pendatang, sehingga di bawah visi politik “*America First*”, Trump menetapkan pembatasan perjalanan sebagai langkah preventif untuk mengutamakan keamanan nasional di atas kepentingan imigrasi internasional (The White House 2017).

Amerika Serikat, menetapkan larangan terhadap negara-negara yang pemerintahannya dinilai gagal memberikan informasi intelijen atau dokumen perjalanan yang cukup untuk proses penyaringan visa. Jika suatu negara tidak kooperatif dalam penegakan hukum imigrasi, Amerika akan menerapkan pembatasan perjalanan sebagai bentuk tekanan diplomatik. Latar belakang kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh sentimen keamanan seperti tragedi 9/11 (11 September 2001) yang masih membekas kuat dalam masyarakat Amerika Serikat. Peristiwa penembakan di San Bernardino juga memperburuk

kekhawatiran terhadap radikalisme sehingga kebijakan ini bertujuan mencegah masuknya warga asing dari negara-negara yang dinilai memiliki sistem pemeriksaan informasi yang kurang memadai, sehingga Amerika Serikat, sulit menilai risiko keamanan yang mereka jaminkan (Peter Margulies 2019)

Daftar larangan awalnya menargetkan negara-negara mayoritas Muslim (seperti Iran, Suriah, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman) yang dianggap sebagai sumber atau pelabuhan teroris. Munculnya serangan teror di berbagai negara dan kekhawatiran akan kelompok radikal membuat pemerintah Amerika Serikat merasa perlu membatasi akses masuk dari wilayah yang dianggap sebagai sarang teroris. Amerika, menilai negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut tidak memiliki sistem pendataan warga yang baik. Hal ini membuat Amerika Serikat, sulit memverifikasi apakah seseorang yang datang benar-benar aman atau tidak. Kebijakan ini merupakan langkah nyata dari visi politik Trump untuk mengutamakan keamanan dalam negeri dan mengurangi beban imigrasi dari negara-negara yang dianggap bermasalah atau tidak kooperatif secara diplomatik (Kate Heirsine 2025)

2.1 Peran Pemerintah Sebagai Produsen Kebijakan “*Travel Ban*”

Kebijakan “*Travel Ban*”, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald J. Trump, pada awal tahun 2017, merupakan salah satu tindakan eksekutif paling kontras dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode 2017-2020. Inisiasi kebijakan ini pertama kali dituangkan melalui *Executive Order* atau perintah resmi presiden ber nomor seri 13769 (*Executive Order 13769*), yang dikenal sebagai “*Travel Ban 1.0*” pada tanggal 27 Januari 2017,

dimana mekanisme kebijakan ini membatasi masuknya warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Suriah, Sudan, dan Yaman. Serta menangguhkan program penerimaan pengungsi Amerika Serikat selama 120 hari dengan dalih peninjauan sistem penyaringan keamanan. Trump selaku Presiden Amerika Serikat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal II Konstitusi dan Pasal 212(f) INA (*Immigration and Nationality Act*), untuk menangguhkan sementara masuknya warga negara dari tujuh negara tersebut, selama 90 hari penangguhan ini dilakukan karena negara-negara tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan nasional akibat keterlibatan dengan kelompok teroris, konflik internal, atau lemahnya kerjasama dalam verifikasi identitas (The White House 2017).

Iran, Sudan, dan Suriah telah lama terdaftar sebagai negara sponsor terorisme, sementara Libya, Somalia, dan Yaman menghadapi zona konflik aktif dan kehadiran kelompok ekstremis seperti ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) dan Al-Qaeda. Namun, Implementasi awal kebijakan ini memicu gugatan hukum dan kritik luas karena dinilai terlalu men generalisir, kurang memberikan mekanisme pengecualian yang jelas, dan dianggap berpotensi diskriminatif berdasarkan latar belakang agama.(Susilowati et al. 2024).

Akibat dinamika tersebut *Executive Order 13769* kemudian di revisi oleh pihak pemerintah menjadi *Executive Order 13780* atau yang dikenal sebagai “*Travel Ban 2.0*” pada tanggal 6 Maret 2017, dengan beberapa perubahan utama yakni, penghapusan Irak dari daftar negara yang terdaftar dikarenakan pertimbangan kerjasama keamanan antara Irak dengan Amerika, lalu adanya penegasan bahwa pemegang *Green Card* (dokumen identifikasi yang

dikeluarkan pemerintah Amerika kepada warga negara asing, yang mendapatkan izin tinggal dan bekerja di Amerika), dan visa resmi tidak langsung terdampak, serta perumusan ulang justifikasi keamanan agar lebih administratif (Roberts, C. J., 2017)

Namun demikian, *Executive Order 13780* tetap menghadapi tantangan hukum lanjutan di pengadilan federal pada Mei 2017, dimana *United States Court Of Appeals For The Fourth Circuit* (pengadilan federal Amerika) dalam perkara *International Refugee Assistance Project V. Trump* menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar *Establishment Clause* (amandemen terkait hukum negara dan agama) karena mempertimbangkan konteks pernyataan publik dalam pidato presiden “*Total And Complete Shutdown Of Muslims Entering The United States*” sebagai bagian dari evaluasi niat kebijakan, dimana putusan ini menunjukkan bahwa revisi pertama belum sepenuhnya mengatasi persoalan konstitusional terkait persepsi diskriminasi agama (Roberts, C. J., 2017)

Dalam konteks tersebut, pemerintah kemudian menggantikan *Executive Order 13780* dan mengeluarkan *Presidential Proclamation 9645* pada tanggal 24 september 2017, setelah proses tinjauan keamanan global selama 90 hari yang melibatkan Departemen keamanan dalam negeri *Department of Homeland Security* (DHS) dan lembaga intelijen FBI (*Federal Bureau Of Investigation*) dalam meinjau keamanan perancangan kebijakan tersebut, dimana perubahan pada versi ini mencakup, adanya penerapan sistem evaluasi global terhadap standar verifikasi identitas tiap negara, dan penyesuaian daftar negara berdasarkan hasil evaluasi teknis termasuk penambahan negara non-Muslim

seperti Korea Utara dan Venezuela, serta mengadakan transformasi kebijakan dari pembatasan sementara menjadi pembatasan berbasis rekomendasi keamanan berkelanjutan. (Roberts, C. J., 2017)

Kebijakan ini memiliki dasar politik yang kuat, karena isu imigrasi dan keamanan nasional telah menjadi bagian penting dalam pidato politik dan kampanye Trump, sebelum dan sesudah pemilu 2016. Sebagai contoh dalam pidato kampanyenya pada 7 Desember 2015, di Mount Pleasant, South Carolina, Trump secara terbuka menyerukan *“A total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country’s representatives can figure out what is going on”* yang kemudian menjadi dasar retorik bagi kebijakan pembatasan perjalanan (Tessa Berenson Rogers 2015).

Pihak Trump menekankan bahwa kontrol imigrasi yang ketat merupakan instrumen penting untuk melindungi warga Amerika Serikat, dari ancaman terorisme dan menegaskan kedaulatan negara atas kebijakan perbatasan. Dampak kebijakan *“Travel Ban”* sangat nyata dalam beberapa bidang kehidupan, khususnya pada sektor pendidikan tinggi, bukti empiris menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah pelamar mahasiswa internasional. Studi terhadap dua universitas di Texas mencatat bahwa jumlah pelamar mahasiswa pascasarjana internasional dari negara-negara mayoritas Muslim turun sebanyak 33,37% sejak musim gugur 2016 hingga 2018, sedangkan pelamar dari negara-negara non-mayoritas Muslim turun sebanyak 18,36% dalam periode yang sama. Penurunan ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dari *“Travel Ban”* terhadap minat dan mobilitas mahasiswa dan calon mahasiswa internasional Amerika, terutama dari negara-negara yang menjadi

sasaran kebijakan (Van De Walker and Slate 2019).

Selain pendidikan, kebijakan ini juga berdampak pada proses verifikasi visa dan kehidupan individu. Eksekusi awal “*Travel Ban*” pada *Executive Order 13769* menyebabkan ratusan pelancong ditahan atau tidak diizinkan masuk di bandara-bandara Amerika ketika kebijakan mulai berlaku, sementara visa bagi calon pengunjung, pekerja dan keluarga mereka ditangguhkan atau dibatalkan sementara. Keputusan ini memicu gelombang protes di berbagai bandara besar karena banyaknya jumlah keluarga yang terpisah dan jalur perjalanan yang tiba-tiba ditutup. Reaksi publik luas ini menjadi bagian dari dinamika domestik yang terus berlangsung antara pendukung dan penentang kebijakan tersebut (Susilowati et al. 2024)

Permasalahan lain yang mengiringi “*Travel Ban*” berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Banyak lembaga hukum dan organisasi hak asasi menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, terutama karena target awalnya adalah negara-negara mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan tuduhan bahwa kebijakan ini memperkuat stereotip dan nilai diskriminasi berbasis agama. Kritik ini datang dari organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pembela imigran yang menyatakan bahwa pembatasan tersebut menempatkan warga dari negara tertentu dalam kategori risiko secara kolektif, tanpa melihat keadaan secara individu (Susilowati et al. 2024).

Reaksi diplomatik juga terlihat pada masa awal penerapan kebijakan di tahun 2017 silam, dimana dalam pernyataan resmi beberapa pemerintah negara-negara yang menjadi sasaran larangan awal, termasuk Sudan dan Somalia,

mereka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tersebut karena dinilai merugikan warganya yang tinggal atau bekerja di Amerika Serikat dan memperumit hubungan bilateral yang telah terjalin sebelumnya. Sebagai contoh pemerintah Sudan menyatakan bahwa kebijakan awal “*Travel Ban*” pada 2017 “mengirim pesan negatif” terhadap upaya normalisasi hubungan dan kerjasama bilateral yang tengah berjalan dengan Amerika, sementara Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo, menyatakan keprihatinan atas dampak kebijakan terhadap komunitas Somalia yang telah berkontribusi, terhadap masyarakat dan ekonomi Amerika Serikat, termasuk anggota komunitas diaspora yang tinggal secara sah di wilayah tersebut (Mohamed Abdelaziz 2017).

2.2 Reaksi Publik sebagai “Umpan Balik” Terhadap Kebijakan

Reaksi publik terhadap kebijakan “*Travel Ban*” berkembang secara cepat dan masif sejak *EO 13769* diresmikan, pada 27 Januari 2017. Dalam hitungan jam setelah kebijakan diberlakukan, seperti contoh yang sudah dibahas sebelumnya dimana, ratusan para imigran dan pemegang visa ditahan di berbagai bandara internasional Amerika Serikat termasuk JFK (*John F. Kennedy Intl Airport*), LAX (*Los Angeles Intl Airport*) dan Dulles (*Washington D.C*) yang kemudian memicu gelombang demonstrasi spontan di lokasi-lokasi tersebut (ACLU 2017). *American Civil Liberties Union (ACLU)*, segera mengajukan gugatan hukum atas nama para imigran yang ditahan, dan dalam waktu dua hari berhasil memperoleh putusan sementara dari pengadilan federal yang menangguhkan sebagian implementasi kebijakan, aksi massa ini menunjukkan bahwa reaksi terhadap “*Travel Ban*” bukan hanya diskursif di media, tetapi juga

terwujud dalam aksi kolektif yang terorganisir dan strategis (BU Today 2017).

Secara empiris, besarnya fenomena ini terlihat dari skala demonstrasi yang meluas ke lebih dari 50 kota di Amerika Serikat pada akhir pekan pertama pasca-penerbitan kebijakan (Daniel WU. 2020). Ribuan pengunjung rasa berkumpul di bandara-bandara utama, sambil membawa slogan seperti “*#No Ban, No Wall*” dan “*Refugees Welcome*”, yang menandakan bahwa kebijakan tersebut dipahami oleh sebagian publik sebagai bagian dari agenda anti-imigrasi yang lebih luas (Daniel WU. 2020).

Tokoh politik partai Demokrat, seperti Senator Elizabeth Warren dan Senator Chuck Schumer, secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut dan hadir dalam aksi protes, dimana hal ini turut memperkuat legitimasi gerakan penolakan di ruang publik Keterlibatan tokoh oposisi ini menunjukkan bahwa reaksi publik juga dipengaruhi oleh sinyal politik dari para aktor partai (Daniel WU. 2020).

Namun demikian, dinamika opini publik tidak bersifat homogen. Dimana menurut survei oleh Quinnipiac University pada 7 Februari 2017, menunjukkan bahwa opini publik terbelah secara tajam yakni sebanyak 42% warga Amerika menyatakan menolak kebijakan tersebut, sementara 51% menyatakan dukungannya terhadap kebijakan “*Travel Ban*”. Polarisasi ini mencerminkan bagaimana *framing* media dan identifikasi partisan berinteraksi dalam membentuk sikap terhadap kebijakan (Rubenstein 2017).

Di tingkat persepsi keamanan, respons publik menunjukkan pola yang lebih kompleks. Dilansir melalui data Reuters mencatat bahwa hanya sekitar sepertiga warga Amerika yang merasa kebijakan tersebut akan meningkatkan

keamanan nasional, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak yakin atau justru merasa kurang aman (Chris Kahn 2017). Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara narasi pemerintah, mengenai urgensi keamanan dan keyakinan sebagai publik terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Dengan kata lain, meskipun isu terorisme menjadi landasan argumentasi resmi, tidak semua warga menerima asumsi bahwa pembatasan perjalanan otomatis berbanding lurus dengan peningkatan keamanan (Chris Kahn 2017).

Reaksi paling kontras dalam aksi massa tersebut datang dari individu-individu yang secara langsung terkena dampak kebijakan. Laporan media menunjukkan lebih dari 700 imigran, mengalami gangguan perjalanan pada akhir pekan pertama penerapan kebijakan, baik berupa penahanan, pembatalan visa, maupun penolakan masuk (Emily Saul 2017). Di antara mereka terdapat mahasiswa pascasarjana, teknokrat profesional, dokter, serta anggota keluarga yang hendak berkumpul kembali dengan kerabatnya, laporan dari *National Education Association* (NEA) secara spesifik menyoroti bagaimana kebijakan ini menjerat mahasiswa pascasarjana dan peneliti, terutama dari negara-negara seperti Iran, yang sedang menempuh studi di universitas – universitas Amerika, dimana NEA melaporkan bahwa banyak peneliti berbakat yang risetnya terhenti atau mereka terpaksa meninggalkan studi mereka dikarenakan ketidakpastian status imigrasi, Fenomena ini dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan akademik oleh para akademisi. Kesaksian para korban yang dipublikasikan di berbagai media menggambarkan pengalaman ketidakpastian, tekanan psikologis, serta kerugian finansial, dimana nilai-nilai humanis inilah yang kemudian memperluas basis empati publik dan memperkuat argumentasi

kelompok penentang (Mary Ellen Flannery 2017).

Komunitas diaspora dari negara-negara yang masuk daftar larangan turut menyampaikan keprihatinan kolektif. *Council On American-Islamic Relations* (CAIR), melaporkan peningkatan kekhawatiran dan laporan diskriminasi di kalangan Muslim- Amerika pasca implementasi kebijakan (Huzaifa Shahbaz 2018). Bagi banyak keluarga imigran, kebijakan tersebut bukan sekadar regulasi administratif, melainkan ancaman terhadap stabilitas kehidupan sosial, menurut *Institute Of International Education* (IIE2018) terjadi penurunan jumlah mahasiswa internasional baru pada tahun akademik 2017-2018 sebesar 6,6%, walaupun faktor penyebabnya bersifat multifaktorial (IIE 2018).

2.3 Media Massa Sebagai Aktor Penyedia Informasi Sekaligus Perantara Antara Media Dan Publik Dalam Kebijakan “Travel Ban”

Kebijakan “Travel Ban” tidak hanya menjadi instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi juga berkembang menjadi arena kontestasi makna di ruang publik Amerika Serikat. Sejak penerbitan pertamanya pada 27 Januari 2017 silam, kebijakan ini memicu perdebatan luas yang tidak hanya berlangsung di ranah politik dan hukum, tetapi juga dalam pemberitaan media massa (Peter Margulies 2019). Dalam konteks ini, media tidak berperan sebagai penyampai informasi yang netral, melainkan sebagai aktor dan penyedia informasi yang secara aktif membingkai (*framing*) realitas melalui pemilihan istilah, sudut pandang, narasumber, dan penekanan isu tertentu. Framing tersebut menentukan apakah “Travel Ban” dipahami sebagai langkah rasional demi keamanan nasional atau sebagai kebijakan diskriminatif yang bertentangan

dengan nilai konstitusional Amerika (Zach Humphries 2017).

Pada dinamika kebijakan luar negeri yang kontras seperti “*Travel Ban*”, media massa tidak sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi sebagai aktor yang memproduksi makna yang menentukan bagaimana publik memahami suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang menyentuh isu keamanan, identitas, dan imigrasi hampir selalu menjadi objek framing karena media perlu menyederhanakan realitas kompleks ke dalam narasi yang dapat dipahami audiensnya (Stuart Hall 1997).

Di antara berbagai media Amerika, CNN dan Fox News menampilkan pola framing yang paling kontras sepanjang periode 2017–2020. CNN cenderung menempatkan kebijakan ini dalam kerangka hak sipil dan kontroversi konstitusional, sedangkan Fox News membingkainya sebagai kebijakan preventif yang sah demi melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Perbedaan *framing* ini tidak hanya mencerminkan orientasi editorial masing-masing media, tetapi juga berkontribusi pada polarisasi opini publik terhadap kebijakan tersebut (Yang 2023).

CNN dan Fox News merepresentasikan dua kutub polarisasi media paling dominan selama era Trump. Dilansir berdasarkan data Pew Research Center pada tahun 2017-2018, menunjukkan bahwa kedua jaringan kabel ini memiliki tingkat konsumsi berita politik tertinggi dengan basis audiens yang sangat tersegmentasi secara partisan. Dimana sekitar 65% pemirsa Fox News secara konsisten mengidentifikasi melalui sudut pandang Partai Republik atau konservatif, sementara sekitar 60% audiens CNN berorientasi paham demokrat atau liberal. Sebagai dua media dengan pola framing paling kontras, kedua media

tersebut secara konsisten merepresentasikan kebijakan “*Travel Ban*” melalui lensa ideologis yang berbeda. Perbedaan ini bukan semata perbedaan gaya pemberitaan, melainkan refleksi dari segmentasi audiens, orientasi politik redaksi, serta struktur polarisasi politik Amerika Serikat pada era Trump (Elisa Shearer 2025).

CNN secara konsisten membingkai kebijakan ini dalam kerangka “*civil rights and constitutional controversy*”, dengan penekanan pada dampak kemanusiaan, diskriminasi agama, dan konflik hukum. Sejak penerbitan pertama kebijakan “*Travel Ban*” pada 27 Januari 2017, dimana CNN berulang kali menggunakan istilah “*Muslim Ban*” dalam laporan dan panel diskusinya, lalu mengaitkannya dengan pernyataan kampanye Trump tahun 2015 tentang larangan perjalanan total bagi warga Muslim. Liputan CNN menyoroti penahanan ratusan imigran di bandara, pemisahan keluarga, gugatan hukum dari organisasi hak sipil seperti ACLU (American Civil Liberties Union), serta gelombang protes di JFK, LAX, dan bandara besar lainnya. Menurut analisis pemberitaan oleh Pew Research Center (2017) menunjukkan bahwa sebanyak 60% liputan media terhadap kebijakan imigrasi “*Travel Ban*” bernuansa negatif atau kritis, dengan fokus pada implikasi terhadap nilai pluralisme dan reputasi global Amerika (ACLU 2017). *Framing* ini didorong oleh orientasi editorial CNN yang menempatkan isu akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak minoritas sebagai prioritas, sekaligus merespons dinamika politik domestik yang sangat terpolarisasi (Elisa Shearer 2025).

Sebaliknya, Fox News membingkai “*Travel Ban*” dalam perspektif “*national security and sovereign authority*” menekankan bahwa kebijakan

tersebut tidak berbasis agama, melainkan pada evaluasi teknis terhadap kegagalan negara-negara tertentu dalam menyediakan data identitas, catatan kriminal, dan kerja sama intelijen yang memadai. Fox lebih sering menggunakan istilah seperti “*security vetting*,” “*terror-prone regions*,” dan “*protecting American lives*,” serta mengaitkan kebijakan dengan trauma kolektif seperti tragedi 9/11 dan serangan San Bernardino. Dalam liputannya, Fox menonjolkan argumen pejabat Gedung Putih bahwa pembatasan perjalanan adalah langkah preventif, sementara untuk menutup celah sistem penyaringan visa (Zach Humphries 2017). Survei Gallup pada tahun 2017 menunjukkan sekitar 80% audiens Fox News sebagian ber ideologis Partai Republik, memperlihatkan keterkaitan antara preferensi media dan sikap kebijakan (Lydia Saad 2022).

Problematika yang muncul dari dualisme framing ini adalah terbentuknya polarisasi informasi dimana pemirsa CNN cenderung memandang kebijakan sebagai nilai diskriminatif dan inkonstitusional, sementara pemirsa Fox melihatnya sebagai kebijakan rasional demi keamanan nasional. Polarisasi *framing* tersebut tidak hanya memperdalam perbedaan opini publik, tetapi juga memengaruhi legitimasi politik kebijakan di ruang domestik, menjadikan media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan aktor yang secara aktif membentuk persepsi dan dinamika antara decision makers dan public opinion dalam isu keamanan dan imigrasi Amerika Serikat (Jamieson and Cappella 2008).

Selain audiens partisan, dampak sosial juga dirasakan oleh komunitas diaspora dari negara-negara mayoritas Muslim, mahasiswa internasional, serta keluarga imigran yang secara langsung terdampak oleh kebijakan.

Pembingkaian yang menekankan narasi ancaman dapat memperkuat stereotip dan persepsi risiko terhadap kelompok tertentu, sementara *framing* berbasis hak sipil meningkatkan solidaritas dan mobilisasi protes publik (Jamieson and Cappella 2008).

BAB 3

ANALISIS INTERAKSI ANTARAKTOR DALAM KEBIJAKAN

“TRAVEL BAN”

3.1 Interaksi Pemerintah dan Media: Strategi Penguasaan Pasar Kebijakan Luar Negeri

Dalam perspektif Baum and Potter (2008), kebijakan luar negeri dipahami sebagai sebuah “pasar informasi” (*Foreign Policy Marketplace*) (Baum and Potter 2008). Dan dalam konteks ini, pemerintah Amerika Serikat dibawah administrasi Donald Trump bertindak sebagai produsen utama yang memegang kendali atas “komoditas” informasi (Baum and Potter 2008). Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa modal utama yang digunakan oleh pemerintah adalah keunggulan informasional (*Informational Advantage*) (Baum and Potter 2008). Tercermin melalui lembaga-lembaga seperti *Department of Homeland Security* (DHS) dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) (Roberts, C. J., 2017). Dimana pemerintah memiliki akses eksklusif terhadap data intelijen dan laporan risiko keamanan global yang tidak dimiliki oleh aktor lain (Baum and Potter 2008). Keunggulan tersebut memungkinkan pemerintah untuk membangun narasi awal bahwa kebijakan “*Travel Ban*” merupakan suatu instrumen rasional guna melindungi warga negara dari ancaman terorisme (Peter Margulies 2019).

Sebagai produsen kebijakan, pemerintah sengaja menciptakan kesenjangan informasi (*Information gap*), dengan menekankan bahwa negara-negara seperti Iran, Suriah, dan Yaman tidak mampu menyediakan data identitas

warga mereka secara transparan dengan alasan kerjasama informasi yang kurang (Susilowati et al. 2024). Dimana pemerintah mencoba meyakinkan publik bahwa risiko keamanan dari pendatang tidak dapat diverifikasi sehingga dalam logika pasar, pemerintah sedang mencoba “membangun nilai jual” berkonotasi rasa aman kepada publik Amerika dengan harga yang cukup tinggi yakni pembatasan imigrasi internasional (Baum and Potter 2008). Hal ini dilakukan melalui visi politik “*America First*”, dimana pemerintah memosisikan keamanan nasional sebagai prioritas absolut atas kepentingan diplomatik lainnya (Max Bergmann and Victor Cha 2020).

Namun, di dalam pasar informasi yang demokratis, posisi pemerintah sebagai produsen tunggal tidak pernah aman (Baum and Potter 2008). Munculnya kehadiran media massa sebagai “pedagang sekaligus penyedia informasi” (*middleman*), mengubah dinamika penguasaan pasar tersebut (Baum and Potter 2008). Dalam hal ini Baum and Potter (2008) menjelaskan bahwa media bukan sekadar penyampai pesan, melainkan aktor yang aktif membigkai (*framing*) realitas (Baum and Potter 2008). Dimana kontestasi yang tajam seperti yang ulas sebelumnya antara CNN dan Fox News, ketika CNN sebagai pedagang informasi yang cenderung kritis, mulai menawarkan produk informasi alternatif, mereka tidak lagi fokus pada data intelijen yang abstrak, melainkan pada fakta empiris di lapangan, dengan menyiarkan visualisasi ratusan pelancong yang ditahan di bandara JFK dan LAX, serta terpisahnya anggota keluarga (Muzaffar Chishti and Jessica Bolter 2019). Yang menunjukkan CNN berhasil merebut monopoli narasi pemerintah, dikarenakan narasi keamanan nasional oleh pemerintah berganti menjadi isu diskriminasi humanis atau agama

dengan judul “ *Muslim Ban*” (Elisa Shearer 2025).

Di sisi lain Fox News, berperan sebagai perantara yang menjaga stabilitas pangsa pasar pemerintah, dengan menggunakan istilah-istilah seperti “*security vetting*” dan “*terror prone regions*” (Yang 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Fox News membantu pemerintah mempertahankan dukungan dari segmen audiens konservatif, dimana mereka mengaitkan kebijakan ini dengan trauma kolektif seperti tragedi penembakan San Bernardino (Peter Margulies 2019). Untuk memvalidasi bahwa produk kebijakan Trump adalah sesuatu yang sah secara moral dan hukum, dimana interaksi antara pemerintah dan media ini menciptakan kompetisi framing yang sangat kuat, ketika pemerintah berusaha menyembunyikan sisi administratif yang lemah di balik alasan intelijen, sementara media khususnya CNN, berusaha membongkar sisi kemanusiaan yang terlupakan. Pertarungan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan penuh untuk mengontrol bagaimana kebijakan luar negeri dipahami oleh publik, karena media secara aktif menyediakan “bingkai” pilihan yang sangat kontras satu dengan yang lain (Baum and Potter 2008).

3.2 Opini Publik sebagai Konsumen: Antara Dukungan Partisan dan Realitas Empiris

Publik Amerika Serikat dalam kebijakan “*Travel Ban*” menempati posisi sebagai konsumen informasi, dimana berdasarkan perspektif Baum and Potter (2008), publik berada dalam kondisi keterbatasan informasi yang tinggi untuk memahami isu kebijakan luar negeri yang kompleks (Baum and Potter 2008). Akibatnya, publik cenderung menggunakan “pintasan informasi” (*information*

shortcut) melalui afiliasi partisan atau media yang mereka percayai dimana hal tersebut menjelaskan tentang data survei oleh Quinnipiac University yang menunjukkan fenomena ini secara jelas ketika opini publik terbelah tajam sejumlah 51% mendukung dan 42% menolak tentang kebijakan ini (Rubenstein 2017). Polarisasi tersebut mencerminkan bagaimana konsumen informasi di Amerika mengonsumsi “barang dagangan” dari media (Baum and Potter 2008).

Namun, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah tidak bersifat statis, hal ini mengacu kepada konsep elastisitas realitas “*Elasticity of Reality*” oleh Baum and Potter (2008) dimana terdapat batasan realitas tentang sejauh mana pemerintah dapat memutar narasi sebelum akhirnya publik menyadari adanya ketidaksesuaian dengan fakta yang ada (Baum and Potter 2008). Hal tersebut tercermin pada masa awal penerapan “*Travel Ban 1.0*”, dimana pemerintah mencoba membangun narasi bahwa kebijakan ini akan segera meningkatkan keamanan nasional, akan tetapi realitas empiris yang ditampilkan oleh media seperti visualisasi para pelajar imigran yang terpaksa menghentikan studinya, serta potret keluarga yang terpisah dan aksi massa, mulai menguji batas elastisitas tersebut (Muzaffar Chishti and Jessica Bolter 2019). Hal tersebut diperkuat oleh studi di dua universitas Texas yang menyatakan bahwa menurunnya jumlah pelamar mahasiswa internasional sejumlah 33,37% dari negara mayoritas Muslim (Van De Walker and Slate 2019). Fenomena ini menggambarkan bahwa ketika publik melihat kebijakan ini justru merugikan sektor penting seperti pendidikan tinggi dan memisahkan keluarga yang sah secara hukum, kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan di titik ini mulai mengalami penurunan (Baum and Potter 2008).

Kekuatan opini publik sebagai “umpan balik” terlihat dari aksi kolektif di lebih dari 50 kota di Amerika Serikat, dimana ribuan pengunjung rasa yang memadati bandara dengan slogan *#No Ban, No Wall*” menunjukkan bahwa sebagian publik telah menolak narasi keamanan yang ditawarkan pemerintah (Daniel WU. 2020). Di titik ini publik mulai tidak lagi menjadi konsumen pasif, dimana mereka melakukan aksi “boikot” terhadap kebijakan pemerintah dan membentuk demonstrasi massa yang diperkuat oleh kehadiran tokoh politik oposisi (Daniel WU. 2020). Penolakan ini menciptakan resonansi politik yang tinggi bagi pemerintah atau adanya “kenaikan harga” karena legitimasi kebijakannya mulai dipertanyakan di ruang publik (Baum and Potter 2008).

Ketidakpastian tersebut diperburuk dengan laporan dari Reuters, yang mencatat bahwa hanya sepertiga warga Amerika yang merasa kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan keamanan (Chris Kahn 2017). Hal ini menunjukkan adanya jurang antara apa yang digaungkan oleh pemerintah sebagai produsen, dengan apa yang dirasakan oleh publik sebagai konsumen (Baum and Potter 2008). Ketika visualisasi realitas empiris oleh media massa menjadi lebih nyata daripada janji keamanan yang abstrak, publik mulai melakukan evaluasi kritis, ditahap ini kondisi pasar terbelah tidak seimbang dikarenakan opini publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memaksa pemerintah untuk tidak bisa bertindak semena-mena dalam memproduksi kebijakan, karena ada ancaman kehilangan legitimasi dan mandat politik di masa depan (Baum and Potter 2008).

3.3 Pencapaian Keseimbangan Pasar: Revisi Kebijakan Sebagai Adaptasi Strategis

Keseimbangan pasar (*market equilibrium*) dalam perspektif Baum and Potter (2008) tercapai ketika arus informasi antara *Decision makers* (pemerintah), *Mass media* (media massa), dan *Public Opinion* (opini publik) berada dalam kondisi yang saling mempengaruhi, sehingga tidak ada satu aktor pun yang mendominasi narasi kebijakan secara mutlak (Baum and Potter 2008). Dalam konteks “*Travel Ban*”, keseimbangan ini tidak tercapai secara instan, melainkan melalui proses adaptasi yang panjang dan kompleks, dimana hal tersebut tercermin melalui adanya revisi pada kebijakan “*Travel Ban*” yang berlangsung ber-ulang kali (Roberts, C. J., 2017), menunjukkan pemerintah harus “menarik produk” mereka secara berkala dan melakukan uji kelayakan dikarenakan tekanan dari pasar informasi (media) dan pihak hukum (pengadilan) (Baum and Potter 2008).

Revisi dari *Executive Order 13769* (“*Travel Ban 1.0*”) menjadi *Executive Order 13780* (“*Travel Ban 2.0*”), hingga akhirnya menjadi *Presidential Proclamation 9645*, yang merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar (Roberts, C. J., 2017). Ketika versi pertama dianggap terlalu mendiskriminasi agama, media dan organisasi masyarakat sipil seperti ACLU, berhasil menekan harga politik kebijakan tersebut hingga jatuh (ACLU 2017). Pemerintah kemudian dipaksa untuk memperbaiki “kemasan” kebijakannya agar lebih mudah diterima di mata hukum dan publik, salah satunya adalah langkah menghapus Irak dari daftar dan memberikan pengecualian bagi pemegang *Green Card* pada versi 2.0 yang

merupakan bentuk negosiasi agar kebijakan ini tidak lagi berkonotasi “larangan Muslim” yang tajam (Kate Heirsine 2025).

Puncak dari upaya pencapaian keseimbangan pasar ini terlihat pada evolusi terakhir kebijakan yakni *President Proclamation 9645* di titik ini pemerintah secara strategis memasukkan negara-negara non-Muslim seperti Korea Utara dan Venezuela (Roberts, C. J., 2017). Dimana secara teoritis hal tersebut merupakan langkah produsen untuk membungkam kritik dari media massa dan publik yang menilai adanya diskriminasi berbasis agama, dengan melibatkan tinjauan keamanan teknis selama 90 hari dengan data yang didukung oleh pihak intelijen (Roberts, C. J., 2017). Pemerintah mencoba merebut kembali kendali atas “keunggulan informasi” mereka, yang mana mereka ingin menunjukkan bahwa daftar negara tersebut disusun berdasarkan evaluasi standar verifikasi identitas objektif, bukan sentimen pribadi presiden (Baum and Potter 2008)

Adaptasi strategis ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi Amerika Serikat, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses adaptif yang terus-menerus, dimana pemerintah Trump, yang awalnya sangat agresif dalam menentukan agenda, akhirnya harus tunduk pada mekanisme kontrol pasar informasi (Baum and Potter 2008). Dimana legitimasi kebijakan “*Travel Ban*” pada akhirnya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan narasi keamanan mereka dengan kenyataan yang dimediasi oleh media dan direaksi oleh publik (Muzaffar Chishti and Jessica Bolter 2019). Meski pada tahun 2018 Mahkamah Agung akhirnya membenarkan posisi pemerintah, perjalanan kebijakan dari 2017 hingga 2020 ini membuktikan bahwa penguasaan

pasar informasi adalah kunci utama, sehingga tanpa adanya kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan opini publik dan menangkis serangan *framing* media, sebuah kebijakan luar negeri akan terus mengalami hambatan dan kontestasi (Baum and Potter 2008).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian data dan analisis mendalam mengenai dinamika kebijakan "*Travel Ban*" dalam panggung politik domestik Amerika Serikat sepanjang tahun 2017 hingga 2020, dapat ditarik sebuah pemahaman komprehensif bahwa kebijakan ini bukanlah sekadar regulasi administratif mengenai kontrol perbatasan. Fenomena ini merupakan perwujudan nyata dari sebuah kontestasi yang sangat kompleks di dalam sebuah pasar kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Marketplace*), dimana informasi menjadi komoditas utama yang diperebutkan. Melalui perspektif teoritis Baum dan Potter, terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan hasil dari tarik-ulur yang intens antara pemerintah sebagai produsen narasi, media massa sebagai penyaring informasi, dan publik sebagai konsumen yang menentukan keberlangsungan legitimasi politik kebijakan tersebut.

Pemerintahan Donald Trump, yang memegang kendali penuh sebagai produsen kebijakan, pada awalnya mencoba mendominasi pasar ini dengan memanfaatkan keunggulan informasional yang melekat pada otoritas eksekutif. Sebagai pihak yang memiliki akses eksklusif terhadap data intelijen dari lembaga keamanan seperti DHS dan FBI, pemerintah memiliki modal besar untuk mendikte definisi mengenai "ancaman". Narasi yang dibangun sangat spesifik, yaitu menjual rasa aman kepada publik melalui visi "*America First*" dengan membingkai negara-negara tertentu sebagai sumber risiko terorisme yang tidak dapat dinegosiasikan.

Upaya menciptakan kesenjangan informasi ini dilakukan agar publik merasa bahwa pembatasan perjalanan adalah satu-satunya solusi rasional untuk melindungi kedaulatan negara. Dalam logika pasar, pemerintah mencoba memaksa publik untuk menerima "harga" kebijakan yang tinggi berupa pembatasan imigrasi yang drastis dengan imbalan janji keselamatan nasional yang absolut.

Namun, dominasi produsen ini segera mendapatkan tantangan serius dari media massa yang berperan sebagai pedagang informasi atau perantara pasar. Di sinilah terjadi pergeseran kontrol narasi yang sangat krusial. Media massa di Amerika Serikat, yang terbelah secara tajam antara kutub kritis seperti CNN dan kutub konservatif seperti Fox News, memberikan pilihan "produk informasi" yang berbeda bagi masyarakat. CNN dan media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi-sisi kebijakan yang tidak diungkap oleh pemerintah, khususnya mengenai dampak kemanusiaan yang nyata di lapangan. Visualisasi mengenai kekacauan di bandara, tertahannya mahasiswa internasional, serta terpisahnya keluarga yang sah secara hukum, menjadi alat yang efektif untuk merusak monopoli informasi pemerintah. Strategi ini secara langsung menguji batas elastisitas realitas, dimana janji keamanan dari pemerintah mulai terlihat kontradiktif dengan penderitaan manusia yang diekspos secara luas. Sebaliknya, Fox News bertindak sebagai penyeimbang yang menjaga loyalitas segmen pasar konservatif dengan terus memvalidasi tindakan pemerintah melalui bingkai kedaulatan kaku, menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar untuk menaikkan atau menurunkan nilai politik sebuah kebijakan di mata audiensnya masing-masing.

Posisi publik sebagai konsumen informasi ternyata jauh lebih dinamis dan tidak bisa dianggap sebagai objek yang pasif. Meskipun publik seringkali memiliki

keterbatasan informasi dalam memahami isu luar negeri yang rumit, mereka tetap memberikan "umpan balik" yang sangat kuat melalui opini publik dan aksi kolektif. Polarisasi tajam dalam hasil survei mencerminkan bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi berdasarkan preferensi partisan mereka, namun reaksi masif di lebih dari 50 kota menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen telah menolak narasi tunggal yang ditawarkan pemerintah. Penurunan minat mahasiswa internasional dan laporan ketegangan sosial di komunitas diaspora menjadi bukti empiris yang menurunkan daya tawar kebijakan tersebut di ruang publik. Gelombang protes dan penolakan ini menciptakan resonansi politik yang besar, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk tidak bisa mengabaikan suara pasar.

Pada akhirnya, serangkaian revisi kebijakan dari *Executive Order* awal hingga Proklamasi terakhir menunjukkan sebuah proses adaptasi strategis untuk mencapai kembali keseimbangan pasar. Pemerintah menyadari bahwa jika mereka tetap mempertahankan produk kebijakan yang cacat secara naratif dan hukum, mereka akan kehilangan legitimasi secara permanen. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk memoles kembali kebijakan dengan memasukkan negara non-Muslim merupakan upaya diplomasi domestik untuk meredam kritik dan memastikan kebijakan tersebut tetap "layak jual" di mata hukum dan sebagian besar publik. Kasus ini membuktikan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan luar negeri akan selalu diuji oleh mekanisme pasar informasi yang sangat ketat, dimana otoritas eksekutif harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan dinamika media dan tuntutan masyarakat agar kebijakannya dapat bertahan dan diterima secara luas.

Tabel Kesimpulan Interaksi Antar Aktor

Aktor	Posisi & Peran dalam “ <i>Foreign Policy Marketplace</i> ”	Strategi/Interaksi	Implikasi kebijakan
Pemerintah (Administrasi Trump)	Produsen kebijakan (<i>Decision makers</i>) dengan keunggulan informasi akses intelijen dan otoritas eksekutif	<i>Framing</i> Keamanan, dalam agenda politik “ <i>America First</i> ” dan revisi bertahap	Kebijakan direvisi (<i>EO 1.0</i>) hingga <i>Proclamation 9645</i> demi legitimasi hukum dan politik
Media (CNN dan Fox News)	Perantara sekaligus penyedia informasi (<i>middleman</i>)	CNN menekankan isu hak sipil dan diskriminasi, sementara Fox menekankan keamanan dan kedaulatan	Terjadi polarisasi opini publik dan peningkatan nilai politik pada kebijakan
Opini Publik	Konsumen dan pemberi umpan balik	Membentuk sikap berdasarkan afiliasi politik dan preferensi media serta melakukan demonstrasi, sebagai bentuk penolakan	Dukungan masyarakat terbelah mengakibatkan tekanan sosial terhadap pemerintah
Lembaga Hukum dan Organisasi Sipil	Mekanisme pengawasan dan koreksi kebijakan	Gugatan konstitusional melalui <i>judicial review</i>	Penangguhan awal kebijakan dan final 2018 menandai tercapainya <i>market equilibrium</i> secara institusional

4.2 Rekomendasi

Sebagai pengembangan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui yang lebih terperinci namun tetap relevan. Studi berikutnya dapat membandingkan kebijakan “*Travel Ban*” pada masa pemerintahan Donald Trump dengan kebijakan imigrasi pada periode setelahnya, untuk melihat apakah pola interaksi pemerintah, media dan opini publik masih menunjukkan dinamika yang sama atau justru berubah. Selain itu, penelitian ke depan juga dapat menyoroti peran media sosial sebagai sumber informasi baru yang semakin berpengaruh dalam

membentuk opini publik. Penggunaan metode kuantitatif seperti survei atau analisis pemberitaan media juga dapat membantu mengukur, secara lebih jelas tentang bagaimana perubahan opini publik terjadi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah, media dan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLU. 2017. "ACLU and Partners Challenge Trump Administration's New Muslim Ban." *Media@aclu.Org* (25 Broad Street 18th Floor New York, NY 10004 United States), September 29. <https://www.aclu.org/press-releases/aclu-and-partners-challenge-trump-administrations-new-muslim-ban>.
- Ali Vitali. 2016. "Donald Trump Shifts on Muslim Ban, Calls for 'Extreme Vetting.'" *NBC News*, July 18. <https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/donald-trump-shifts-muslim-ban-calls-extreme-vetting-n611276>.
- Amnesty International. 2017. *Majority of Americans Oppose Trump's Muslim Ban as Its Impact Becomes Clearer*. no. politics (February). <https://www.amnesty.nl/actueel/majority-of-americans-oppose-trumps-muslim-ban-as-its-impact-becomes-clearer>.
- Baum, Matthew A., and Philip B. K. Potter. 2008. "The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis." *Annual Review of Political Science* 11 (1): 39–65. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060406.214132>.
- BU Today. 2017. *Trump Immigration Ban Spurs Anxiety and Confusion*. (New York), January 30. <https://www.bu.edu/articles/2017/trump-immigration-ban/>.
- Chris Kahn. 2017. *Exclusive: A Third of Americans Think Trump's Travel Ban Will Make Them Safer*. (United States), February 1. <https://www.reuters.com/article/world/exclusive-a-third-of-americans-think-trumps-travel-ban-will-make-them-safer-idUSKBN15F2MG/>.
- Clapton, William. 2021. "The Exceptionalism of Risk: Trump's Wall and Travel Ban." *European Journal of International Security* 6 (2): 129–47. <https://doi.org/10.1017/eis.2020.22>.
- Daniel WU. 2020. *Newsom Denounces Trump; Mayor Issues Curfew for Part of City's Downtown*. (New York), June 11. <https://www.washingtonpost.com/nation/2025/06/10/la-protests-ice-live-updates/>.
- Elisa Shearer. 2025. *The Political Gap in Americans' News Sources*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2025/06/pj_2025-06-10_news-media-sources_report.pdf.
- Emily Saul. 2017. *Politics Immigrants Describe Being Detained during Trump's Travel Ban*. (New York), February 7. <https://nypost.com/2017/02/07/immigrants-describe-being-detained-during-trumps-travel-ban/>.
- Gadi Wolfsfeld. 1997. *Media and Political Conflict*. The Press Syndicate of The University Of Cambridge. https://books.google.co.id/books?id=qaCl693cdhkc&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb.

- Homolar, Alexandra, and Ronny Scholz. 2019. "The Power of Trump-Speak: Populist Crisis Narratives and Ontological Security." *Cambridge Review of International Affairs* 32 (3): 344–64. <https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1575796>.
- Howell, William. 2003. *Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action*.
- Huzaifa Shahbaz. 2018. *2018 Civil Rights Report: Targeted*. February 9. <https://islamophobia.org/civil-rights-reports/2018-civil-rights-report-targeted/>.
- IIE. 2018. *Number of International Students in the United States Reaches New High of 1.09 Million*. November 13. <https://www.iie.org/news/2018-11-13-number-of-international-students-reaches-new-high/>.
- Jamieson, K. H., and J. N. Cappella. 2008. *Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=sY9oAgAAQBAJ>.
- Kate Heirsine. 2025. *Warga Dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk Ke AS*. May 6. <https://www.dw.com/id/warga-dari-12-negara-ini-dilarang-trump-masuk-ke-as/a-72793862>.
- Kirdiş, Esen. 2021. "Islamic Populism in Turkey." *Religions* 12 (9): 3–13. <https://doi.org/10.3390/rel12090752>.
- Lydia Saad. 2022. *U.S. Immigration Views Remain Mixed and Highly Partisan*. Politics. Gallup. <https://news.gallup.com/poll/395882/immigration-views-remain-mixed-highly-partisan.aspx#:~:text=Desire%20for%20Less%20Immigration%2C%20by%20Party%20ID&text=Percentages%20were%20similar%20by%20party,important%20problem%20facing%20the%20country>.
- Mary Ellen Flannery. 2017. *Trump's Muslim Ban Snares Grad Students, Researchers*. Digital Article. <https://www.nea.org/nea-today/all-news-articles/trumps-muslim-ban-snares-grad-students-researchers>.
- Max Bergmann and Victor Cha. 2020. "Navigating Disruption Ally and Partner Responses to U.S. Foreign Policy." *CSIS* (New York) Navigating Disruption (October): 13–15. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-10/251006_GFP_Navigating_Disruption.pdf?VersionId=eSkSG.yasobvZC5BYzmmh_CbbJefp44T.
- Moffitt, Benjamin. 2016. *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.11126/stanford/9780804796132.001.0001>.
- Mohamed Abdelaziz. 2017. "Regional Consequences of Trump's Travel Ban." Policy Analysis. *FIKRA FORUM*, April 20. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/regional-consequences-trumps-travel-ban>.
- Muzaffar Chishti and Jessica Bolter. 2019. "The Travel Ban at Two: Rocky

- Implementation Settles into Deeper Impacts.” *Migration Policy Institute*, January 31. <https://www.migrationpolicy.org/article/travel-ban-two-rocky-implementation-settles-deeper-impacts>.
- Peter Margulies. 2019. “THE TRAVEL BAN DECISION, ADMINISTRATIVE LAW, AND JUDICIAL METHOD: TAKING STATUTORY CONTEXT SERIOUSLY.” *Columbia Law School* 33:159: 162. <https://www.law.georgetown.edu/immigration-law-journal/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/The-Travel-Ban-Decision.pdf>.
- Roberts, C. J., 2017. “TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES, ET AL. v. HAWAII ET AL.” *SUPREME COURT OF THE UNITED STATES* 585 U.S (October). https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf.
- Rubenstein. 2017. *AMERICAN VOTERS OPPOSE TRUMP IMMIGRATION BAN, QUINNIPIAC UNIVERSITY NATIONAL POLL FINDS; BIG GENDER GAP AS VOTERS DISAPPROVE OF TRUM*. (275 Mounct Carrel Avenue), February 7, 3–15. https://poll.qu.edu/images/polling/us/us02072017_U27bhrqt.pdf.
- Sides, John, Michael Tesler, and Lynn Vavreck. 2018. *Identity Crisis: The 2016 Presidential Campaign and the Battle for the Meaning of America*. Princeton university press.
- Stuart Hall. 1997. *REPRESENTATION Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
- Susilowati, Ida, Fadhlan Nur Hakiem, Nabila Salsabila Sudirman, Dewi Sulistyawati, and Ratna Alfina Nurcahyani. 2024. “U.S Travel Ban Policy on 6 Muslim Countries as Attempt of Donald Trump Government in Counter-Terrorism in 2017.” *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 9 (2): 67–84. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v9i2.12512>.
- Tessa Berenson Rogers. 2015. *Donald Trump Calls For ‘Complete Shutdown’ of Muslim Entry to U.S*. Politics. December 7. <https://time.com/4139476/donald-trump-shutdown-muslim-immigration/>.
- The White House. 2017. *Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*. https://trumpwhitehouse-archives-gov.translate.goog/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Van De Walker, Dana, and John R. Slate. 2019. “The 2017 Trump Administration Travel Ban and International Graduate Applications at Two Texas Public Universities.” *Higher Education Politics & Economics* 5 (1): 1–14. <https://doi.org/10.32674/hepe.v5i1.1173>.
- William C. Canby, Richard R. Clifton, and, Michelle T. Friedland, Circuit Judges, and United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. 2017. *State of Washington v. Trump*. F.3d. No. 17-35105. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. <https://www.aclu-wa.org/publicatio>.

- Yang, Jinhe. 2023. "How Mass Media Influences U.S. Political Polarization— A Comparison Study of CNN and Fox News." *SHS Web of Conferences* 178: 4–5. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317802005>.
- Zach Humphries. 2017. "The President and the Executive Order: Examining Cable News Coverage of President Trump's Travel Ban." *Point Park University*, September. https://www.researchgate.net/publication/318708262_The_President_and_the_Executive_Order_Examining_Cable_News_Coverage_of_President_Trump's_Travel_Ban.